



## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019

Monica Luxsiana<sup>1</sup>, Jean Elikal Marna<sup>2</sup>

Universitas Negeri Padang <sup>1,2</sup>

Corresponding author: [monicaLuxsiana@gmail.com](mailto:monicaLuxsiana@gmail.com)

**Abstract :** *This discussion has the intention of conducting research the effect of original local government revenue, general allocation funds and specific allocation funds in regencies and cities in West Sumatra Province in 2016-2019 using the Panel Regression analysis tool. The model estimation result show that the variables of Regional government revenue, general allocation funds, and specific allocation funds simultaneously or jointly influence economic growth in Districts/Cities of West Sumatra Province in 2016-2019. While partially the economic growth affected by the original local government revenue and General allocation fund .*

**Keywords :** *Economic Growth, original local government revenue, general allocation funds, Specific allocation funds*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

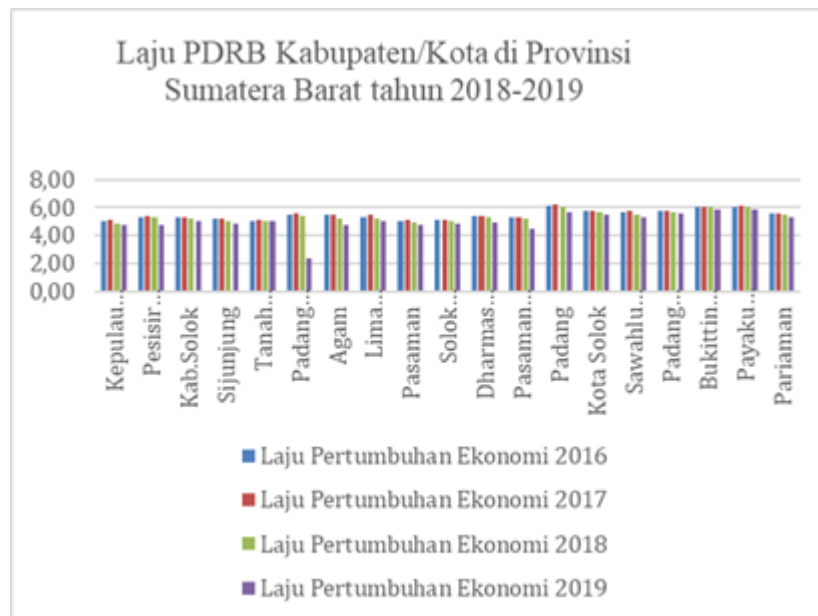
### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari tahapan perubahan keadaan ekonomi sebuah bangsa dengan konsisten kearah keadaan yang membaik dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan menjadi peningkatan berjangka panjang pada kesanggupan sebuah bangsa guna memberikan ketersediaan lebih banyak kategori barang perekonomian, kapasitas tersebut meningkat sejalan majunya ekonomi serta penyesuaian institusional serta ideologis (Jhingan, 2016). Pertumbuhan ekonomi adalah bagian krusial pada tahapan pembangunan baik nasional maupun regional. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi disertai dengan pembangunan fisik dan sosial tetap menjadi tujuan utama dalam rencana pembangunan nasional dan regional. Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan ekonomi masing-masing daerah (Suweni, 2020).

Berpedoman pada TAP MPR No.XV/MPR/1998, 1 Januari 2001, Pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah. Pemerintahan RI dengan resmi mendeklarasikan dilaksanakannya otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah akan mendorong pemerintah

untuk mengatur daerahnya sendiri sehingga daerah tersebut menjadi daerah yang mandiri dan menjadi sumber pembangunan nasional. Dengan dorongan untuk memacu daerah ini, daerah berusaha untuk mengembangkan potensinya masing-masing sehingga dapat mewujudkan percepatan ekonomi (Saraswati, 2018).

Sistem otonomi daerah memberi kekuasaan pada pemerintah daerah (pemda) guna mengendalikan anggarannya sendiri dan memberikan hak kepada setiap daerah untuk mengatur kondisi politik untuk pengendalian anggarannya. Gambar di bawah ini menunjukkan laju PDRB kabupaten/kota di Sumatera Barat (sumbar) dari periode 2016-2019. Disajikan pada gambar 1.1 berikut:



**Gambar 1. Laju PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.**

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2022

Data tersebut menunjukkan Laju PDRB berfluktuasi di Provinsi Sumatera Barat serta ditinjau dari kabupaten/kota juga masih terdapat begitu banyak Kabupaten/Kota yang mengalami stagnan pada pertumbuhan ekonominya, dan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2016 – 2019.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan, tiap daerah masih memerlukan pendanaan yang tidaklah sekedar bersumber dari APBN, namun melalui pendapatan asli daerah (PAD). Setiap daerah memiliki potensi perekonomian yang berbentuk aktivitas perekonomian yang bisa menghimpun pendanaan dari daerah berbentuk PAD serta memberikan pendanaan bergulir guna pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemda wajib menyesuaikan dengan pengembangan diri daerah, berupaya meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperbaiki bermacam bidang yang dapat mengalami perkembangan sebagai sumber PAD (Suandi, 2016).

Pemda mempunyai kewajiban mengelola PAD. Yang mana dana itu didapatkan melalui khalayak sehingga khalayak memiliki hak menerima kelayakan berbentuk pembangunan yang dilakukan Pemda (Nurjanah, 2018). Peningkatan PAD akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah (Nasution, 2018).

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah pusat mendistribusikan transfer keuangan ke berbagai daerah di Indonesia setiap tahun berbentuk Dana Perimbangan (Fusanto, 2018). Pengalokasian Dana alokasi umum dengan mempertimbangkan peluang daerah dan kondisi pemerataan daerah untuk memperkecil kesenjangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal. Dana alokasi umum, pendanaan yang bersumber dari APBN akan dialokasikan untuk melaksanakan desentralisasi bertujuan menyeimbangkan kesanggupan fiskal antar daerah guna mendanai keperluan belanja daerah (Ainingrum, 2017).

Dana Alokasi Khusus ini adalah dana APBN yang diberi pada Pemda guna membiayai aktivitas tertentu secara regional dan nasional. DAK adalah sistem transfer pemerintahan Pusat kepada daerah, dengan maksud guna memberikan peningkatan ketersediaan fasilitas fisik daerah selaras dengan kepentingan nasional serta meminimalisir ketimpangan regional dalam tingkat pertumbuhan dan ketimpangan pelayanan publik daerah (Subekan, 2012)

Beberapa dari pendapatan itu bisa dipakai guna membiayai pengeluaran pemerintahan pada periode tertentu. Maksud kebijaksanaan fiskal tersebut ialah untuk melakukan stabilisasi harga, tingkatan output, dan peluang kerja, serta untuk merangsang pertumbuhan perekonomian (Siagian, 2018)

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus
2016	1.964.148.975,80	1261915864,00	1180338806,00
2017	2.134.010.519,50	2014646639,00	1699580667,86
2018	2.275.090.068,59	2014646639,00	1784401030,48
2019	2.328.432.873,68	2076398191,00	1844831704,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2022

Nilai PAD, DAU dan DAK provinsi Sumbar mengalami peningkatan. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cenderung menurun. Artikel ini membahas pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.

## METODE PENELITIAN

Studi ini termasuk asosiatif kausatif. Studi ini memakai data sekunder yang didapat dari BPS. Populasi dalam studi ini ialah keseluruhan kabupaten dan kota yang ada pada Provinsi Sumatera Barat yang jumlahnya sebanyak 19, meliputi 12 kabupaten serta 7 kota tahun 2016-2019. Teknik analisis data yang dipakai ialah Regresi data panel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Persamaan regresi data panel disajikan sebagai berikut :

$$\text{Log}(Y) = 2,306768 + 0,050765 \text{Log}(X_1) + 0,043421 \text{Log}(X_2) - 0,128743 \text{Log}(X_3)$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub> = Dana Alokasi Umum

X<sub>3</sub> = Dana Alokasi Khusus

Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki nilai konstan 2,306768. Pendapatan asli daerah dengan koefisien 0,050765 menunjukkan apabila pendapatan asli daerah naik sebesar satu satuan maka nilai pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,050765. Dana alokasi umum dengan koefisien 0,043421 menunjukkan apabila dana alokasi umum naik sebesar satu satuan maka nilai pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,043421 dan dana alokasi khusus dengan koefisien -0,128743 menunjukkan apabila dana alokasi khusus naik sebesar satu satuan maka nilai pertumbuhan ekonomi turun sebesar -0,128743.

**Tabel 2. Hasil Uji Regresi**

Variable	Coefficient	Prob
C	2.306768	0.0001
LN__X1_	0.050765	0.0207
LN__X2_	0.043421	0.0635
LN__X3_	-0,128743	0.0000

Sumber : Hasil Olahan Eviews12 , 2023

Output regresi menunjukkan bahwa tingkat signifikansi untuk variabel PAD sejumlah 0,0207 lebih kecil dibanding 0,05, yang membuktikan bahwasanya variabel PAD berkorelasi signifikan dengan pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Sumatera Barat. Perolehan regresi membuktikan bahwasanya hasil signifikan variabel DAU sejumlah 0,0635, perolehan tersebut melebihi tingkatan signifikan 0,05, hingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya DAU tidak memberi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pada variabel DAK hasil regresi menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,129269 dan angka signifikan 0,000 hasil tersebut berada di bawah taraf signifikansi 0,05.

## Uji Statistik

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi**

Adjusted R-squared	0.218456
--------------------	----------

Sumber : Hasil Olahan Eviews12 , 2023

Angka *Adjusted R-squared* bernilai 0.21845, menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (Y) dipengaruhi 21,84% oleh variabel PAD (X<sub>1</sub>), DAU (X<sub>2</sub>) serta DAK (X<sub>3</sub>), adapun sisanya 78,16% diterangkan variabel lainnya yang tidak dijelaskan pada studi ini.

### Uji F (simultan)

**Tabel 6 Uji F (simultan)**

Prob(F-statistic)	0.000114
-------------------	----------

Sumber : Hasil Olahan Eviews12 , 2023

Hasil uji F membuktikan bahwa secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

### Uji t (Parsial)

**Tabel 7. Uji t (Parsial)**

Variable	Prob
C	0.0001
LN_X1_	0.0207
LN_X2_	0.0635
LN_X3_	0.0000

Sumber : Hasil Olahan Eviews12 , 2023

Hasil uji t menyimpulkan bahwa variabel yang memberikan pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi ialah variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus. Adapun, dana alokasi umum memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian membuktikan bahwasanya variabel PAD memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik. Hal tersebut selaras dengan temuan penelitian Pramana (2022)

yang menunjukkan hasil bahwasanya secara parsial PAD memberi pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Ini disebabkan oleh semakin besar pendapatan di suatu daerah semakin besar pula pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. PAD menjadi pendapatan daerah yang begitu mendukung pembangunan daerah di bawah desentralisasi. Hal ini disebabkan tingginya PAD, sehingga Pemda dapat mengoptimalkan kemampuan PAD. Karena PAD merupakan sumber pemasukan daerah, maka dengan meningkatnya PAD keuangan daerah juga meningkat, dalam hal ini Pemda memiliki inisiatif dalam memetakan potensi daerahnya.

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.**

Hasil penelitian membuktikan bahwasanya variabel DAU memberikan pengaruh tetapi tidak signifikan. Maksudnya, meningkatnya DAU tidaklah sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan. Hal itu sejalan dengan temuan studi Dewi et al (2017) dimana variabel DAU dalam pertumbuhan perekonomian membuktikan bahwa secara parsial DAU tidak memberikan pengaruh signifikan pada pertumbuhan perekonomian di Kota Manado.

Hal tersebut dikarenakan DAU yang didapatkan daerah tidaklah dipakai guna pemerataan pertumbuhan perekonomian antara daerah, hingga peranan DAU tidak mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. DAU yang didapatkan daerah seharusnya dialokasikan guna membiayai pembangunan seperti fasilitas publik yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pada kenyataannya DAU digunakan untuk pembelanjaan rutin. DAU yang tidak begitu fleksibel dalam penggunaannya mengakibatkan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki fleksibilitas penuh pada perencanaan alokasi anggaran. Seharusnya DAU digunakan untuk pembangunan fasilitas dasar yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

#### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.**

DAK secara parsial memberi pengaruh negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut selaras dengan temuan studi Arina et al., (2019) yang mana DAK memberi pengaruh negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian Widyasari (2013) membuktikan bahwasanya DAK tidaklah memberikan pengaruh positif pada Pertumbuhan Ekonomi.

DAK ialah pendanaan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah khusus guna memberikan bantuan membiayai aktivitas khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah. DAK tidaklah memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan perekonomian kabupaten dan kota pada provinsi Sumatera Barat, yang kemungkinan disebabkan oleh sifat DAK yaitu sebagai dana khusus. Dikarenakan, sebagian besar DAK dialokasikan pada fasilitas pendidikan serta kesehatan yang mungkin tidak menjadi prioritas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

## **SIMPULAN**

Temuan Penelitian menyimpulkan bahwa PAD, serta DAK dan DAU berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat dengan simultan PAD, DAU dan DAK

memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi serta dengan parsial variabel PAD serta DAU Umum memberikan pengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi . Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan dengan meningkatkan PAD serta DAU. Keterbatasan penelitian ini dari tahun penelitian yaitu tahun 2016-2019 dan menggunakan tiga variabel penyebab. Peneliti selanjutnya dapat menambah tahun data dan memakai variabel lainnya yang memberikan pengaruh pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainingrum, E. (2017). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pangkep*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Arina, M., Koleangan, R. , & Engka, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* , 2, 26–35.
- Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 18(3), 1745–1773.
- Fusanto, A. (2018). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening*. Universitas Sumatera Utara .
- Jhingan, M. L. (2016). *The Economics of development and planning*. Rajawali Pers,RajaGrafindo Persada.
- Nasution, S. A. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan.
- Nurjanah, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. In *skripsi*. Universitas Negeri Lampung Raden Intan Lampung.
- Pramana, I. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh*.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Vol.8 No.2 Januari 2018*, 8(2), 54–68.
- Siagian, E. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016*.
- Suandi, I. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. In 2016. Universitas Negeri Makassar.
- Subekan, A. (2012). *Keuangan Daerah: Terapi Atasi Kemiskinan*. (1st ed.). Dioma .
- Suweni, E. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Cilegon Tahun 2008-2015*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin.
- Widyasari, N. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. 1–18.